

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Untuk menambah ketajaman dalam penelitian ini, penulis perlu menjadikan penelitian terdahulu sebagai referensi dalam upaya untuk mencapai tujuan penelitian secara baik. Penelitian terdahulu yang menjadi referensi diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Marwan (2014) yang melakukan penelitian tentang Studi Ekonomi Politik: Pengelolaan Pariwisata Di Kabupaten Wakatobi, penelitiannya tersebut menggambarkan tentang bagaimana peran pemerintah dalam pengelolaan pariwisata di Wakatobi, menggambarkan kepentingan swasta dan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata di Wakatobi serta implementasi terhadap kepentingan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata di Wakatobi.

Yang selanjutnya merupakan penelitian yang dilakukan oleh Jejen Zaenal Hilmi (2017), penelitian tersebut merupakan penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif, dengan judul Studi Ekonomi Politik Pengelolaan Objek Wisata *Green Santirah* Di desa Selasari kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Berbeda dengan yang penulis teliti, bahwa penelitian yang dilakukan oleh Jejen tersebut terfokus pada pengelolaan wisatanya.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Herni Marina (2014), penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan judul Ekonomi Politik Pariwisata Kawasan Wisata Lagoi Kabupaten Bintan. Penelitian ini

menggambarkan tentang Kabupaten Bintan yang sangat tergantung dari sektor pariwisata khususnya dari kawasan wisata Lagoi. Oleh sebab itulah Kawasan wisata Lagoi menjadi sumber perekonomian di Kabupaten Bintan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan sangat berpengaruh terhadap pembangunan sosial dan politik Kabupaten Bintan.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Okta Zahara (2014), penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan judul Analisis Pengelolaan Objek Wisata Kebun Binatang Kasang Kulim di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggambarkan kendala-kendala permasalahan dalam pengelolaan objek wisata serta menganalisis tentang seperti apa pengelolaan objek wisata Kebun Binatang Kasang Kulim tersebut.

2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Isi penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Marwan (2014) topik : Studi Ekonomi Politik : pengelolaan pariwisata di Kabupaten Wakatobi	Menggambarkan tentang bagaimana peran pemerintah Wakatobi dalam pengelolaan pariwisata, memperkenalkan kekayaan alam di wakatobi, selain itu juga menggambarkan tentang bagaimana upaya-upaya	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teknik observasi dan wawancara sebagai pengumpulan data.	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Marwan berbeda dengan penulis yang akan diteliti yaitu jika penelitian oleh Marwan mengenai studi ekonomi politik mengenai pengelolaan pariwisata, dalam hal ini penulis memfokuskan penelitian yang

		peningkatan sumber daya manusia serta melakukan perlindungan ekosistem melalui taman nasional wakatobi.		akan di kaji ke dalam pembangunan ekonomi masyarakat desa setelah munculnya wisata baru di desa tersebut.
2.	Jejen Zaenal Hilmi (2017) Topik : Studi Ekonomi Politik Pengelolaan Objek wisata <i>Green Santirah</i> di desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.	Penelitian ini menggambarkan tentang bagaimana pengelolaan wisata <i>Green Santirah</i> tersebut yang merupakan termasuk wisata baru yang berada di Kabupaten Pangandaran, serta menggambarkan tentang perhatian pemerintah Kabupaten Pangandaran terhadap adanya wisata <i>Green Santirah</i> tersebut.	Dalam hal ini persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara dan juga sama-sama membahas ekonomi politik.	Perbedaan yang ada dalam penelitian ini yaitu fokus objek yang diteliti berbeda, jika pada penelitian yang dilakukan oleh Jejen yaitu pada pengelolaan wisata, namun jika penulis objeknya hanya tercantum pada kondisi pembangunan ekonomi politik masyarakat Desa Cintaratu.

3.	Okta Zahara (2014), Topik : Analisis Pengelolaan Objek Wisata Kebun Binatang Kasang Kulim di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar	Penelitian ini menggambarkan indikator seperti pengembangan, kelembagaan dan pengaturan. Dari hasil rekapitulasi pengukuran terhadap masing-masing indikator tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa Pengelolaan objek wisata kebun binatang kasang kulim dalam kategori cukup baik dengan kisaran nilai persentase 36,84%. Untuk itu pengelolaan kebun binatang kasang kulim tidak terlepas dari peranan pemerintah dan masyarakat setempat.	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menganalisa tentang bagaimana pengelolaan pariwisata yang sama-sama tidak terlepas dari peranan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaannya.	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu teknik dalam pengumpulan informan berbeda, dengan menggunakan teknik <i>sampling incidental</i>, berbeda dengan penulis yang digunakan yaitu teknik <i>purposive sampling</i>.
----	--	--	---	--

4.	Herni Marina (2014), Topik : Ekonomi Politik Pariwisata Kawasan Wisata Lagoi Kabupaten Bintan	Hasil penelitian ini menggambarkan Kawasan Lagoi dikelola oleh PT. Bintan Resort Cakrawala (BRC). Sejak awal dibuka hingga sekarang, Kawasan Lagoi telah menggunakan dolar (dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat) sebagai alat bertransaksi. Sumber (PAD) Kabupaten Bintan sangat tergantung dari sektor kawasan wisata Lagoi. Oleh sebab itulah Kawasan wisata Lagoi menjadi ekonomi politik di Kabupaten Bintan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan sangat berpengaruh terhadap pembangunan sosial dan politik Kabupaten Bintan.	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti pada ruang lingkup analisis ekonomi politik serta sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif.	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu dalam fokus permasalahannya, jika penelitian yang dilakukan oleh Herni Marina lebih ke PAD Kabupaten Bintan yang bersumber dari sektor wisatanya, jika yang penulis teliti yaitu lebih fokus ke bagaimana analisis ekonomi politik pengelolaan wisatanya.
----	---	--	--	---

2.2 Analisis Ekonomi Politik

Menurut James A. Caporaso (2008:1) pada dasarnya sering diasumsikan bahwa ekonomi politik adalah integrasi antara ilmu ekonomi dengan ilmu politik, satu hal yang jarang diungkapkan bahwa ide ekonomi politik itu sendiri sebenarnya didasarkan pada pemisahan antara ilmu politik dengan ilmu ekonomi. Jika ilmu politik dengan ilmu ekonomi disatukan secara konseptual, maka ekonomi politik tidak dapat lagi dipandang sebagai hubungan antara dua jenis telaah yang berbeda.

Ekonomi dan politik merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, hal tersebut dapat dikaji dari dua sisi yang berbeda yaitu sisi ekonomi dan sisi politik. Berbagai kebijakan ekonomi menjadi tidak memiliki “*power*” untuk dilaksanakan tanpa ada dukungan politik, dengan kata lain politik berperan untuk menempatkan dan mendorong kebijakan ekonomi sebagai kebijakan yang harus dilaksanakan.

Ada banyak definisi ilmu ekonomi yang dikemukakan oleh para ekonom, salah satu penulis dan pemikir ekonomi yang memiliki reputasi internasional dan karyanya banyak dipakai oleh berbagai pihak adalah Gregory Mankiw, beliau mengatakan, “*Economics is the study of how society manages its scarce resource*” . pembahasan dan perkembangan ilmu ekonomi sejalan dengan proses perkembangan berbagai permasalahan yang terjadi dimuka bumi, fokus perhatian ilmu ekonomi hanyalah pada barang ekonomi.

Pemahaman barang ekonomi adalah berlawanan dengan barang non ekonomi, barang ekonomi artinya memiliki jumlah yang terbatas dan bersifat langka, adapun peminatnya tidak terbatas sehingga dengan begitu kondisi ini bisa menyebabkan terjadinya pembentukan harga dipasaran. Contohnya barang sembako, bahan bakar kendaraan, obat-obatan, dan lain-lain. Sedangkan barang non ekonomi tidak memiliki nilai dan bisa diperoleh dengan mudah, contohnya udara, sinar matahari dan air laut. Harga dan titik keseimbangan itu terbentuk berdasarkan pergerakan dan tarik ulur antara *demand* dan *supply*.

Menurut Irham Fahmi (2013:3), dalam pembahasan ilmu ekonomi yang begitu luas, maka pembahasan dibagi menjadi dua bagian yaitu mikro ekonomi dan makro ekonomi. Mikro ekonomi membahas bagian kecil dari ilmu ekonomi yaitu meliputi perilaku produsen dan konsumen. Sedangkan pada makro ekonomi meliputi pembahasan yang jauh lebih kompleks dan luas, yaitu sesuatu yang bersifat agregat dalam ekonomi, pembahasan itu mencakup inflasi dan deflasi serta berbagai sebab akibatnya, pendapatan nasional, pengangguran, neraca pembayaran, perdagangan luar negeri, dan lain-lain.

Dalam bidang ilmu ekonomi ada beberapa permasalahan umum yang selalu dihadapi dan harus dicarikan solusinya, yaitu yang pertama adanya sesuatu barang (*goods*) yang semakin lama jumlahnya semakin sedikit, dimana ini secara otomatis membuat harga barang tersebut terus mengalami kenaikan, contohnya minyak dan gas serta luas tanah. Yang kedua adalah

jumlah penduduk yang semakin lama semakin meningkat, namun ketersediaan sandang, pangan dan papan tidak selalu tersedia dalam jumlah yang mencukupi, kondisi ini berakibat pada ketidakseimbangan neraca pembayaran, seperti impor bisa lebih meningkat, dan ekspor lebih rendah.

Menurut Irfan Fahmi (2013:8), ekonomi politik merupakan suatu ilmu yang mengkaji bagaimana persoalan-persoalan ekonomi yang terjadi di suatu negara di selesaikan dengan menempatkan kekuatan politik sebagai kekuatan pendukung dalam memberikan solusi terhadap kasus-kasus ekonomi. Hubungan antara ekonomi dan politik bisa bermakna eksplanatori (menjelaskan bagaimana keduanya terkait) dan bisa juga bersifat normatif (bagaimana seharusnya sifat perkaitan diantara kedua disiplin ilmu tersebut). Sebagai suatu disiplin ilmu yang lebih komprehensif, ekonomi politik lahir dari berbagai upaya yang dilakukan untuk menemukan sinergi, mengisi kekosongan yang dijumpai dalam satu disiplin ekonomi atau disiplin politik saja.

Menurut James A. Caporaso (2008:12), salah satu cara untuk memahami ekonomi politik adalah dengan memandang bahwa ekonomi adalah terkait dengan urusan pribadi dan politik terkait dengan urusan publik. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai individu dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu tujuan yang bersifat pribadi (baik dari segi motif maupun dari segi hasilnya) dan tujuan yang melibatkan orang lain. Namun sebenarnya perbedaan antara mana yang pribadi dan mana yang publik tidak mudah untuk dilakukan, dalam dunia empiris terjadi pergeseran pada batas keduanya,

“pribadi” merujuk pada urusan-urusan yang sifatnya terbatas pada individu atau kelompok yang terlibat secara langsung dalam pertukaan yan tersangkut dengan urusan itu. Sementara “public” didefinisika sebagai wilayah atau kegiatan yang melibatkan orang lain dalam urusan yang cukup besar.

Dalam perkembangan ilmu selanjutnya terdapat beberapa definisi yang beraneka ragam sifatnya, pada zaman Adam Smith hanya mengenai ekonomi politik, yaitu mempelajari masalah kesejahteraan masyarakat, bagaimana kemiskinan dan taraf hidup masyarakat, pengertian yang sempit ini kemudian dilanjutkan oleh para Sarjana selanjutnya.

Menurut Paul A. Samuelson (1990:4), bahwa ekonomi politik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia menentukan pilihannya, baik dengan uang atau tanpa uang dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas jumlahnya. Dan mempunyai alternatif-alternatif penggunaannya untuk menghasilkan barang dan kemudian mendistribusikanya, baik utnuk sekarang masa akan datang di antara anggota-anggota masyarakat

George Leland Bach (1990:4), berpendapat bahwa ilmu yang mempelajari bagaimana memproduksi/membuat barang-barang dan jasa-jasa kita inginkan dan kemudian mendistribusikannya di antara anggota masyarakat. Selanjutnya menurut Ace Partadireja ekonomi berarti suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia menggunakan dan memanfaatkan sumber alam yang ada di dunia ini.

2.2.1 Model Perekonomian Sosialis dalam Ekonomi Politik

Menurut Winardi (1993:93), sosialisme adalah suatu organisasi masyarakat, dimana alat-alat produksi dikuasai oleh pemerintah. Keputusan-keputusan mengenai bagaimana dan apa yang akan dihasilkan dan siapa yang akan mencapai apa, dilakukan bukan oleh perusahaan-perusahaan yang dimiliki serta yang dikelola oleh pihak-pihak swasta, melainkan oleh pemerintah.

Jadi dapat dimengerti bahwa negara mempunyai pengaruh besar dalam menentukan apa yang harus dibuat dan juga jalannya aplikasi dari keputusan ekonomi tersebut. Kekuatan pemerintah dalam ekonomi sosialis adalah begitu kuat sehingga ini bisa menyebabkan keputusan pemerintah harus betul-betul diperhatikan dan diamati oleh para pebisnis. Negara yang menganut sistem sentralisasi adalah terlihat dimana peranan negara sangat besar dalam menentukan setiap kebijakan keberlangsungan bangsa tersebut.

Irfan Fahmi (2013:77) mengatakan bahwa tokoh yang paling mempengaruhi lahirnya konsep ekonomi sosialisme adalah Karl Marx (1818-1883) dan Friederich Engel (1820-1895), mereka ini adalah dua tokoh intelektual dan revolusioner yang paling berpengaruh pada abad ke-19. Karya Marx yang terkenal dan masih dijadikan rujukan oleh para akademisi sampai sekarang, *Schumpeter* adalah kapital yang terdiri atas tiga jilid yang pertama sekali diterbitkan pada tahun 1867, 1885, dan 1894.

2.2.2 Teori Keynesian

Menurut James A. Caporaso (2008:238), pendekatan Keynesian mengajukan sebuah kritik terhadap konsep pasar yang meregulasi dirinya sendiri yang banyak digunakan oleh para pemikir klasik dan neoklasik sebelumnya. Kritik dari pendekatan Keynesian ini mempertanyakan pandangan bahwa sistem pasar yang tidak diregulasi akan dapat sepenuhnya memanfaatkan potensi produksi yang ada dalam sebuah masyarakat.

Jika pasar secara sistematis mengalami kegagalan untuk mendapatkan permintaan agregat maka itu akan berdampak terhadap kemampuan pasar sebagai mekanisme untuk memenuhi kebutuhan. Penilaian tentang mampu tidaknya pasar ini tergantung dengan pandangan bagaimana hubungan antara urusan pribadi dengan badan publik, sehingga berdampak juga terhadap pandangan tentang keterpisahan antara bidang ekonomi dengan politik dan sejauh mana ekonomi dapat mendominasi kehidupan masyarakat.

Pendekatan Keynesian memfokuskan pada ketidakstabilan proses reproduksi dan pertumbuhan dalam perekonomian kapitalis. Perekonomian kapitalis mengandung proses-proses yang membuat reproduksi di dalamnya menjadi tidak stabil sehingga tidak dapat diperkirakan secara pasti perkembangannya. Proses-proses yang menimbulkan ketidakstabilan ini membuat ragu tentang sejauh mana pasar yang meregulasi dirinya sendiri dapat dijadikan institusi bagi masyarakat untuk merorganisir produksi dan distribusi barang.

Teori Keynisian memiliki implikasi yang luas terhadap ekonomi politik, pasar yang meregulasi dirinya sendiri tidak dapat diandalkan untuk menjamin ketersediaan nafkah bagi mereka yang tergantung pada pendapatan dari lapangan kerja. Selain itu ketersediaan masyarakat untuk menabung juga tidak dapat menghasilkan akumulasi kapital yang diperlukan untuk membuat dana tabungan itu menghasilkan keuntungan.

Kesimpulan-kesimpulan dari pendekatan Keynesian ini membawa pada kesimpulan yaitu bahwa perlu adanya intervensi dari negara untuk membantu mendefinisikan peran dari negara dalam hubungannya dengan perekonomian. Negara bertindak untuk mewujudkan kondisi makroekonomi yang diperlukan agar upaya individu-individu untuk mengejar kepentingan pribadinya sendiri tidak membawa dampak negatif.

James A. Caporaso (2008:287) mengatakan ada tiga titik kemampuan negara dalam mempengaruhi perekonomian, sebagai berikut:

1. Pengeluaran pemerintah, pemerintah menggunakan pendapatannya untuk membeli barang dari sektor swasta, menyerap tenaga kerja, memberikan pendapatan bagi konsumen dan terhadap berbagai lembaga tanpa memperhitungkan apa kegiatan ekonomi yang dilakukan individu, dan lembaga ini dapat memberikan barang dan jasa lain sebagai imbalannya.
2. Pinjaman pemerintah, salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk melakukan pengeluaran pemerintah adalah dengan

meminjam dari sektor swasta, pemerintah dapat mengeluarkan surat hutang negara yang dapat dibeli oleh individu atau perusahaan.

3. Pajak, negara dapat mendanai kegiatan-kegiatannya tanpa harus meminjam yaitu dengan cara mencetak uang atau lewat pajak.

Salah satu kesulitan yang dihadapi oleh pendekatan Keynisian adalah keterbatasannya pada pemahamannya terhadap negara, jika negara dipandang sebagai manager ekonomi yang kompeten. Maka tidak perlu menggunakan konteks politik untuk memahami apa yang dilakukan negara, karena manajemen ekonomi dapat tetap dipandang sebagai kegiatan ekonomi biarpun pelaksanaannya adalah sebuah lembaga politik.

Namun jika pengelolaan ekonomi itu sudah mulai melibatkan proses politik dan jika intervensi negara tergantung pada politik, maka tidak dapat lagi memandang negara sebagai sekedar manager ekonomi yang kompeten. Karena aspek politik sudah tidak dapat dihindari lagi di dalam kegiatan stabilisasi terhadap perekonomian. (James A. Copraso, 2008:294).

2.3 Peran Sektor Pariwisata Dalam Perekonomian

Menurut Yoeti (1996:112) pariwisata berasal dari Bahasa sangsakerta, yang terdiri dari dua suku kata, yaitu “pari” dan “wisata”. Pari berarti banyak, berkali-kali atau berputar-putar, sedangkan wisata berarti perjalanan, berpergian yang berarti sinonim dengan kata “travel” dalam bahasa Inggris. Menurut Undang-undang Nomor 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan Bab I Pasal I dinyatakan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian

dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.

Menurut Unggul Priyadi, (2016: 41-42), definisi yang luas pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Sedangkan dalam literatur lainnya pariwisata merupakan salah satu industri yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal penyediaan lapangan kerja, pendapatan, taraf hidup, dan dalam efek *multiplier* sektor bagi produksi lainnya.

Menurut Hutabarat (1992:53), dalam buku Pariwisata Syariah Prospek dan perkembangan berpendapat bahwa peranan pariwisata saat ini mencakup pertama, peranan ekonomi yaitu sebagai sumber devisa negara, kedua peranan sosial yaitu sebagai penciptaan lapangan pekerjaan dan yang terakhir adalah peranan kebudayaan yaitu untuk memperkenalkan kebudayaan dan kesenian. Ketiga poin tersebut dapat dijelaskan, sebagai berikut:

a. Peran Ekonomi

Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah. Peningkatan pendapatan pemerintah berasal dari pembelanjaan dan biaya yang dikeluarkan wisatawan. Pengembangan pariwisata berpengaruh positif pada perluasan peluang usaha dan kerja, peluang usaha dan kerja tersebut lahir karena adanya

permintaan wisatawan. Dengan demikian kedatangan wisatawan ke suatu daerah akan membuka peluang usaha bagi masyarakat.

b. Peran Sosial

Sarana dan prasarana seperti hotel, restoran, dan perusahaan perjalanan adalah usaha-usaha yang padat karya. Untuk menjalankan jenis usaha tersebut dibutuhkan tenaga kerja dan semakin banyak wisatawan yang berkunjung maka semakin banyak pula peluang lapangan kerja yang tercipta.

c. Peran Kebudayaan

Mendorong terpeliharanya lingkungan hidup, kekayaan dan keindahan alam seperti flora dan fauna, taman laut, lembah hijau, pantai dan sebagainya, merupakan daya Tarik wisata. Daya Tarik tersebut harus tetap dipelihara dan dilestarikan.

Berdasarkan ketiga poin diatas yang telah dijelaskan, maka peran sektor pariwisata berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang besar kontribusinya. Di Indonesia, sektor pariwisata berkontribusi sebesar 9,1 % dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan secara langsung memperkerjakan kurang lebih 8,9 juta jiwa dalam peluang usaha di bidang pariwisata.

Menurut Unggul Priyadi (2016:76), kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyatakan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam,

manusia, dan budaya yang melimpah serta tersebar luas diberbagai daerah. Hal tersebut menjadikan sektor pariwisata Indonesia memiliki potensi yang sangat cerah, namun agar potensi dapat di optimalkan diperlukan usaha yang sungguh-sungguh srta kerja sama yang erat di antara pemangku kepentingan pariwisata yang teridiri dari pemerintah, wisatawan, pelaku bisnis pariwisata, serta masyarakat dan juga kunci pengembangan pariwisata ada di pemerintah daerah, pariwisata mampu memberi kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mempunyai efek pengganda yang besar terhadap perkembangan ekonomi daerah.

2.3.1 Sistem Kepariwisataan

Umggul Priyadi (2016:29) mengatakan pariwisata adalah suatu aktifitas yang kompleks yang dapat dipandang sebagai suatu sistem yang besar. Melihat pariwisata sebagai sebuah sistem berarti terdapat analisis mengenai berbagai aspek kepariwisataan. Hal ini tidak terlepas dari subsistem yang lain seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, isu lingkungan, ekologi dan lain-lain. Sebagai sebuah sistem antar komponen dalam sebuah sistem tersebut terjadi hubungan interpedensi, yang berarti bahwa perubahan dalam salah satu subsistem akan menyebabkan terjadinya perubahan pada subsistem yang lainnya.

Sedangkan menurut Burns dan Holden (2016-32), mengemukakan bahwa dalam sistem pariwisata ada banyak aktor yang berperan dalam sistem kepariwisataan. Aktor tersebut adalah insan-insan pariwisata yang ada pada

berbagai sektor pariwisata, secara umum, insan pariwisata dikelompokkan dalam tiga pilar utama, yaitu masyarakat, swasta dan pemerintah.

Masyarakat adalah masyarakat umum yang sah dari berbagai sumber daya yang merupakan modal pariwisata, seperti kebudayaan, selanjutnya dalam kelompok swasta terdiri dari asosiasi usaha pariwisata dan para pengusaha. Sedangkan dalam kelompok pemerintah mencakup berbagai wilayah administrasi, mulai dari pemerintah pusat, negara bagian, provinsi, kabupaten, kecamatan dan seterusnya.

Sedangkan menurut Mathieson dan Wall (2016:31) menyatakan bahwa sistem pariwisata secara sederhana bahwa sistem pariwisata terdiri atas tiga elemen yaitu elemen dinamis, yaitu perjalanan wisatawan, elemen statis yaitu keberadaan di destinasi dan elemen konsekuensial yaitu berbagai dampak yang timbul. Poon (2016:31) mengatakan sistem pariwisata dengan perspektif yang berbeda pula, yang lebih menekankan pada aspek pemasaran pariwisata, menurutnya sistem pariwisata terdiri atas subsistem produksi, subsistem delivery, subsistem manajemen dan subsistem distribusi dan penjualan.

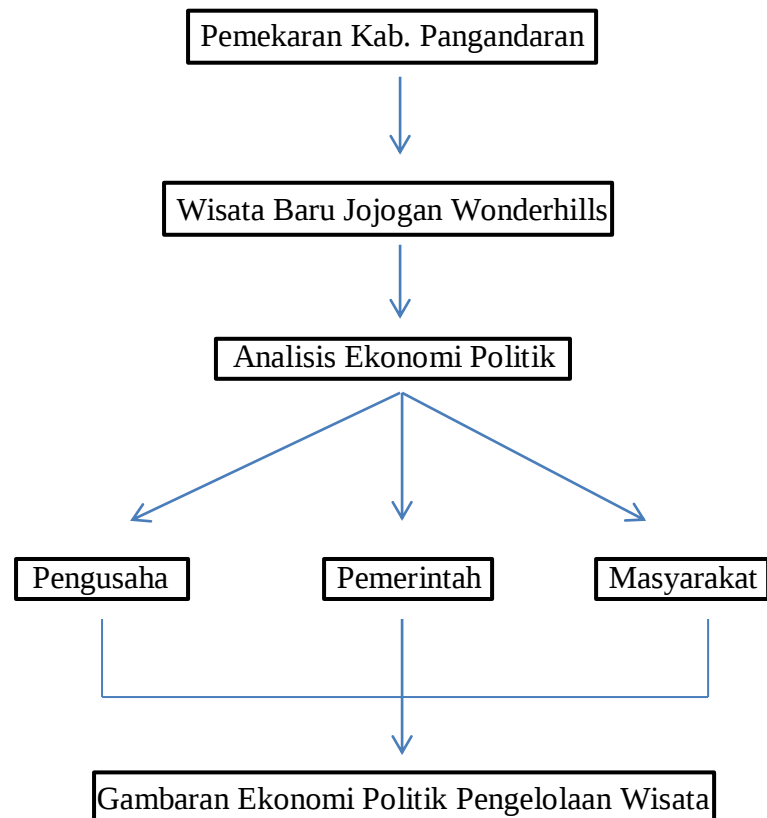
2.3.2 Kebijakan dan Strategi Pemerintah dalam Mengembangkan Kepariwisata

Menurut Unggul Priyadi (2016:80), adapun beberapa kebijakan dan strategi pemerintah untuk pengembangan pariwisata, sebagai berikut:

- a. Pengembangan wilayah dengan pendekatan pengembangan ekosistem, yaitu penataan ruang

- b. yang dilakukan dengan pendekatan secara terpadu, terkoordinasi, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- c. Peningkatan keterkaitan fungsi pengembangan kegiatan pariwisata yang baik dengan sektor lainnya untuk memberikan nilai efisiensi yang tinggi dan percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah.
- d. Pengembangan pariwisata harus dikaitkan dengan pengembangan ekonomi nasional, wilayah dan lokal, pada tingkat nasional sektor pariwisata harus berperan sebagai *prime mover*.
- e. Pengembangan pariwisata harus diupayakan dapat melibatkan seluruh *stakeholder*, dalam konteks ini peran masyarakat terlibat mulai dari sektor hulu (memberikan kegiatan produksi yang ekstraktif).
- f. Pemanfaatan rencana pengembangan wilayah secara nasional harus terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), di dalam RTRWN diberikan arahan-arahan fungsi lindung dan budidaya, kawasan lindung dapat dioptimalkan sebagai kawasan yang memberikan dukungan bagi kegiatan pengembangan pariwisata.
- g. Pengembangan dukungan sarana-prasarana transportasi secara terpadu dan terkait dengan struktur pengembangan wilayah.

2.4 Kerangka Pemikiran



2.4.1 Deskripsi Kerangka Pemikiran

Dinamika pertumbuhan perekonomian Pangandaran setelah melakukan pemekaran dari Kabupaten Ciamis pada tahun 2012 merupakan salah satu hal menarik untuk dikaji. Terutama peran sektor pariwisata yang mempengaruhi terhadap perekonomian masyarakat Kabupaten Pangandaran, dimana Kabupaten Pangandaran merupakan kabupaten yang mengedepankan sektor pariwisata sebagai bidang andalan untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerahnya.

Banyaknya jumlah destinasi wisata alam ataupun pantai yang bermunculan setelah menjadi kabupaten, tentu hal tersebut merupakan langkah awal dalam mewujudkan salah satu visi dan misi Pangandaran sebagai salah satu tujuan wisata dunia. Salah satu wisata alam baru yaitu Jojogan *Wonderhills* merupakan wisata baru yang mempunyai peran positif terhadap perkembangan di bidang pariwisata, serta mampu berkontribusi khususnya bagi perekonomian masyarakat Desa Cintaratu.

Dalam kaitannya dengan ekonomi politik, seberapa jauh mempengaruhinya wisata tersebut terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat Desa Cintaratu dibalik adanya beberapa permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini. Kemudian dikaitkan dengan kajian analisis ekonomi politik dengan menggunakan Teori Keynisian, agar tahu lebih jauh mengenai bagaimana kondisi analisis ekonomi politik masyarakat Desa Cintaratu pasca munculnya wisata baru Jojogan *Wonderhills* tersebut.